

PENATAAN DAN PEMBUATAN ADMINISTRASI DESA UNTUK MENUNJANG LOMBA DESA

Ni Wayan Rustiarini, Luh Komang Merawati*, Ida Ayu Dwi Cahyani Murti,

Ni Putu Onik Puspita Sari

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: mettamera@unmas.ac.id

ABSTRAK

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Tanpa administrasi yang baik, mustahil tujuan pada pemerintahan desa dapat tercapai. Melalui pengabdian kepada masyarakat ini kami melaksanakan program kerja dengan metode pelaksanaan penataan dan pembuatan administrasi desa dalam membantu aparat desa dalam menunjang kegiatan lomba desa baik dalam mengumpulkan data serta penginputan data sesuai dengan daftar lampiran susunan penilaian lomba desa. Berdasarkan program kerja pelaksanaan penataan dan pembuatan administrasi desa dalam menunjang lomba desa telah dilaksanakan dengan realisasi ketercapaian 100% yang didukung dengan hasil pengukuran kegiatan pelaksanaan tersebut yang dimana penulis dapat memenuhi keperluan administrasi desa.

Kata Kunci: administrasi desa, lomba desa, penataan administrasi

ANALISIS SITUASI

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil yang ada di wilayah negara Indonesia. Ketentuan mengenai pemerintah desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Aturan ini menjelaskan bahwa keberadaan desa berperan penting dalam pembangunan nasional karena sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan. Melalui undang-undang tersebut, desa memiliki legalitas hukum untuk menetapkan peraturan desa yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan desa (Irawan, 2017). Undang-undang ini sekaligus mengamankan beberapa hal penting seperti pembenahan administrasi desa, penataan tata kelola birokrasi, dan menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan anggaran pemerintah desa (Mulyono, 2014).

Desa Bongkasa Pertiwi merupakan salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Desa yang memiliki ±2.504 jiwa penduduk ini terbagi dalam tiga banjar, yaitu Karang Dalem I, Karang Dalem II, dan Tegal Kuning. Pada tahun 2023, Desa Bongkasa Pertiwi mendapat

kepercayaan untuk mewakili Kecamatan Abiansemal dalam mengikuti lomba desa tahun 2023. Pelaksanaan lomba desa ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan desa dari berbagai aspek, seperti aspek pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan dan bidang lainnya. Selain itu, lomba desa juga digunakan sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan desa dalam membangun wilayahnya dan meningkatkan kualitas penduduknya (Arisanti & Sardjono, 2023). Salah satu poin penting dalam penilaian lomba desa adalah pemenuhan data yang berkaitan dengan administrasi desa di Desa Bongkasa Pertiwi.

Administrasi desa merupakan proses pencatatan informasi dan data terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, proses administrasi pemerintahan desa memuat data mengenai pemerintahan desa. Informasi tersebut dituangkan dalam buku register desa, yang terdiri dari administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, serta pencatatan administrasi lainnya. Administrasi desa tidak hanya berperan untuk mempermudah perangkat desa dalam melayani masyarakat (Tamawiji, 2015), namun juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan (Sutopo et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintahan desa harus memberikan perhatian yang serius untuk memenuhi kelengkapan administrasi desa, khususnya dalam menunjang lomba desa.

Adapun program kerja yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu pihak desa dalam memenuhi kelengkapan administrasi desa yang diperlukan dalam lomba desa. Selain itu, pelaksana pengabdian melakukan penataan dan pembuatan administrasi desa seperti dokumen penunjang lomba desa, melakukan penginputan administrasi kependudukan, serta menginventarisasi data terkait kelompok PKK yang ada di desa Bongkasa Pertiwi. Dengan demikian, program kerja ini diharapkan dapat membantu perangkat desa dalam mempersiapkan diri mengikuti lomba desa.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa dan perangkat Desa Bongkasa Pertiwi, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, yakni:

1. Kurangnya kelengkapan data administrasi desa, khususnya berkaitan dengan kebutuhan lomba desa. Selain itu, terdapat kekeliruan dalam pengelompokan data.
2. Belum melengkapi data administrasi kependudukan melalui dokumen yang diminta (microsoft excel).

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut yang disampaikan oleh Kepala Desa dan perangkat desa tersebut, pelaksana merumuskan program kerja pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Melakukan pembuatan, pengumpulan, dan penataan administrasi desa sesuai

dengan kebutuhan dalam lomba desa.

2. Melakukan penginputan data administrasi kependudukan dan penginputan data PKK dalam dokumen microsoft excel.

METODE PELAKSANAAN

Mitra kegiatan pengabdian ini adalah Kepala Desa dan perangkat Desa Bongkasa Pertiwi. Metode pelaksanaan terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap observasi, yaitu pelaksana melakukan penggalan informasi terkait permasalahan-permasalahan administrasi desa. Dalam hal ini, pelaksana melakukan investarisasi kebutuhan data administrasi desa yang diperlukan dalam lomba desa.
2. Tahap pelaksanaan, yaitu pelaksana melakukan pengumpulan data, pengelompokkan data, serta penyusunan data yang belum dimiliki.
3. Tahap evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik harus didukung oleh administrasi pemerintahan desa yang baik pula. Untuk mencapai hal tersebut, perangkat desa harus berkomitmen untuk menciptakan sistem administrasi yang baik (Sulandra & Mudarya, 2018). Hal ini tidak hanya menjadi pondasi untuk memperkuat pemerintahan desa, namun sekaligus mencirikan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Administrasi pemerintahan desa yang baik dipercaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Wasistiono et al., 2014). Pengumpulan data administrasi juga diperlukan untuk memudahkan pemerintah desa dalam mendata keberadaan penduduk yang tinggal di wilayah Desa Bongkasa Pertiwi. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi desa yang baik harus menjadi perhatian serius dari aparat desa, terlebih menjadi salah satu indikator dalam penilaian lomba desa.

Tahapan pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan program kerja adalah melakukan wawancara dengan perangkat desa terkait bidang administrasi desa. Setelah mendapatkan informasi terkait kebutuhan lomba desa, pelaksana pengabdian melakukan inventarisasi data-data yang diperlukan. Terdapat 307 data administrasi yang harus disediakan oleh perangkat desa sebagai persyaratan mengikuti lomba desa. Data-data tersebut terbagi dalam tiga bidang, yaitu bidang kemasyarakatan (sebanyak 82 data), bidang kewilayahan (sebanyak 80 data), dan bidang pemerintahan (sebanyak 145 data). Adapun data-data administrasi yang diperlukan ditampilkan pada Gambar 1. Setelah melakukan inventarisasi, pelaksana pengabdian mulai untuk mengumpulkan dan mengelompokkan data sesuai dengan bidang yang ditentukan, yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 1.
Daftar dokumen yang harus
dikumpulkan



Gambar 2.
Pengelompokkan dokumen sesuai
bidang

Setelah sebagian data terkumpul, pelaksana pengabdian melakukan pemindaian dokumen serta melakukan konversi dalam bentuk pdf. Meskipun demikian, terdapat sebagian data yang belum tersedia sehingga tim pelaksana perlu melakukan penginputan data tersebut dalam microsoft word dan microsoft excel. Adapun data-data tersebut seperti data kependudukan dan data kelompok PKK. Data administrasi meliputi data kepala keluarga untuk tiga banjar, yaitu untuk Banjar Tegal Kuning (219 KK), data Banjar Karang Dalem 1 (35 KK), dan Banjar Karang Dalem (307 KK). Sementara data PKK yang harus diinput adalah data untuk enam kelompok. Adapun data dan proses penginputan data disajikan pada Gambar 3 dan 4.



Gambar 3.
Dokumen kependudukan yang diinput



Gambar 4.
Tahap penginputan data kelompok
PKK

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan. Secara keseluruhan, pelaksanaan program kerja tentang penataan dan pembuatan administrasi di Desa Bongkasa Pertiwi telah terlaksana dengan baik. Adapun indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan adalah perbandingan jumlah data yang disyaratkan dengan jumlah data yang berhasil dikumpulkan, yang diukur menggunakan persentase. Hasil evaluasi disajikan pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1.
Penataan Administrasi Lomba Desa

No	Daftar Data Penilaian Lomba Desa	Jumlah Data yang Diminta	Data yang Dikumpulkan
1	Bidang kemasyarakatan	82	82
2	Bidang kewilayahan	80	80
3	Bidang pemerintahan	145	145
Total		307	307

Tabel 2.
Pembuatan Data Administrasi

No	Data KK	Jumlah data yang diberikan	Jumlah data KK yang diinput
1	Data KK Br Tegal Kuning	219 KK	219KK
2	Data KK Br Karang Dalem 1	35 KK	35KK
3	Data KK Br Karang Dalem 2	307 KK	307 KK
4	Data Kelompok PKK	6 data	6 data
Total		567	567

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa pelaksana telah berhasil mengumpulkan 307 data administrasi untuk tiga bidang, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam lomba desa. Selanjutnya, pelaksana juga berhasil menginput data administrasi kependudukan sebanyak 567 data yang terdiri dari data KK dan data kelompok PKK. Realisasi ketercapaian program kerja disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Realisasi Ketercapaian Program Kerja

No	Spesifikasi Kegiatan	Realisasi
1	Penataan administrasi desa dalam menunjang kegiatan lomba desa	100%
2	Pembuatan administrasi kependudukan dan melakukan penginputan ke Microsoft Word dan Microsoft Excel.	100%

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program kerja tersebut. Salah satu faktor yang mendukung adalah dukungan aparat desa untuk menyediakan fasilitas sehingga program kerja ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program kerja terkait penataan dan pembuatan administrasi desa telah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi ketercapaian adalah 100%. Selain itu, pelaksana dapat mengumpulkan

dan melengkapi data sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, program kerja ini diharapkan dapat membantu desa dalam menata sistem administrasi desa yang tertib, sekaligus mendukung desa dalam mengikuti lomba desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti, E., & Sardjono, H. S. (2023). Pengaruh kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat dan komunikasi terhadap keberhasilan lomba desa: (Studi di Desa Parangan, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur). *Jl@ P*, 12(1).
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438–444.
- Sulandra, I. M., & Mudarya, I. N. (2018). Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa. *Locus*, 9(1), 28–38.
- Sutopo, D. S., Nugroho, A. B., & Yunita, N. (2022). Horison kemajuan desa menyelami peranan pemimpin dan pemerintahan desa. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 147–161.
- Tamawiw, R. (2015). Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1103.
- Wasistiono, S., Tahir, I., & AP, M. S. (2014). Tinjauan ulang (review) tentang administrasi dan pemerintahan desa. *Journal Ummat*, 1–40.